

**PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG
KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**OLEH:
QORY ARFAN
1803090030**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

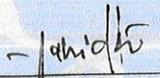
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

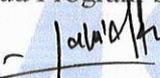
Nama Lengkap : **QORY ARFAN**
N.P.M : 1803090030
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : **PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG KEC.SEI SUKA KAB.BATUBARA**

Medan, 26 Desember 2023

Dosen Pembimbing


Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

Dekan,


Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., MSP.



BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : QORY ARFAN
N P M : 1803090030
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Jumat, 29 September 2023
W a k t u : 08:00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.EFENDI AUGUS.,M.Si.
PENGUJI II : SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos
PENGUJI III : Assoc.Prof.Dr.H.MUJAHIDDIN.S.,Msp

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, **Qory Arfan** NPM **1803090030**, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 8 Juni 2024
Yang menyatakan,



Qory Arfan

**PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SIMODONG
KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA**

**QORY ARFAN
1803090030**

ABSTRAK

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, terjadinya ketidak pedulian terhadap faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam proses pembangunan di tingkat desa. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Penelitian awal yang dilakukan dihasilkan bahwa kurang adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa Simodong baik itu dukungan materil maupun non materil terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan program pemberdayaan masyarakat dirasakan kurang tepat sasaran seperti mengutamakan keluarga dan kerabat dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik wawancara sehingga mempermudah untuk mendapatkan hasil penelitian dari narasumber. Penelitian ini akan di lakukan pada Pemerintahan Desa Simodong, Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Simodong, dan masyarakat Desa Simodong.

Kata Kunci: Pembangunan , Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini. Skripsi saya yang berjudul **“Proses Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”** disusun untuk memenuhi syarat sebagai sarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada proses penyelesaian skripsi ini tentunya telah melibatkan banyak pihak yang telah memberikan waktu serta tenaga untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Teristimewa penulis sampaikan Terima Kasih kepada Ayahanda Muslim Harun dan Ibunda Marpuatunyang sudah selalu memberikan motivasi, dukungan dan kepercayaan demi penyelesaian studi penulis. Serta kepada kakak saya Maya Azizah dan abang saya Ali Wardhana yang selalu memberikan dorongan dan semangat agar terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos,M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin,S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing mendidik, mendukung, memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar. .
6. Bapak Ibu Dosen Dan Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus Dosen-Dosen Kesos yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada penulis.
7. Terima kasih untuk para narasumber Pemerintah Desa Simodong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Masyarakat Desa Simodong yang telah bersedia untuk memberikan waktu dan informasi kepada penulis terkait permasalahan yang penulis kaji pada skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa yang berkenan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 10 Oktober 2023

Penulis

Qory Arfan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Perencanaan Pembangunan.....	6
2.1.1 Pengertian Pembangunan	6
2.1.2 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	8
2.1.3 Proses Perencanaan Pembangunan Desa	10
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	12
2.2.1. Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.2.2 Sasaran Pemberdayaan masyarakat.....	17
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan.....	20
2.3 Desa.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Kerangka Konsep.....	26
3.3 Defenisi Konsep.....	27
3.4 Kategori Penelitian.....	28
3.5 Subjek dan Informan Penelitian.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6.1 Observasi.....	29
3.6.2 Wawancara.....	29
3.6.3 Dokumentasi.....	29

3.7 Teknik Analisis Data	30
3.7.1 Pengumpulan Data	30
3.7.2 Reduksi Data.....	31
3.7.3 Penyajian Data	31
3.7.4 Penarikan Kesimpulan.....	31
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Profil Lokasi Penelitian.....	32
4.2 Peran Masyarakat terhadap Pembangunan.....	33
4.3 Proses Pembangunan Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	38
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, terjadinya ketidakpedulian terhadap faktor tersebut dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam proses pembangunan di tingkat desa. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat berkompetisi secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya dengan cara menolong mereka untuk belajar menggunakan pendekatan lobi, menggunakan media, terlibat dalam aksi politik, memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat bekerja secara sistematis, dan lain-lain. Pemberdayaan adalah sebuah politik pembangunan alternatif yang menekankan keutamaan politik sebagai sarana pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*.

Selanjutnya memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Di tingkat desa lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diharapkan menjadi pilar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto 2004:154).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukannya yaitu sebagai mitra pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat mengayomi kehidupan masyarakat dalam proses pembangunan desa, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah desa.

Tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemberdayaan masyarakat juga memiliki fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil - hasil pembangunan secara partisipatif.
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat.
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal. Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya pembangunan di desa. Pembangunan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terletak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun harus lebih dari hal itu. Tujuan dari esai ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pembangunan desa dalam pembangunan nasional.

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Desa simodong merupakan salah satu desa yang ada Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dengan ± 3000 jumlah penduduk . Kebijakan dan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh perangkat desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) akan sangat mempengaruhi terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

Studi yang dilakukan peneliti melalui hasil observasi dan wawancara pada tanggal 1-5 Juli 2023 pada beberapa anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan beberapa warga Desa Simodong didapat hasil bahwa tidak adanya program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam proses perencanaan pembangunan yang sedikit banyaknya akan berdampak kepada pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dilakukan wawancara yang lebih mendalam kepada yang bersangkutan dihasilkan bahwa kurang adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa Simodong baik itu dukungan materil maupun non materil dan program pemberdayaan masyarakat dirasakan kurang tepat sasaran seperti mengutamakan keluarga dan kerabat dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan temuan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Proses Perencanaan Pembangunan Desa sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana proses perencanaan pemabngunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah wawasan dan preferensi penelitian ilmiah mahasiswa program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana ilmiah dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang menyangkut tentang prose perencanaan pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk pemerintahan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa.

1.4.3 Masyarakat

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai proses pembangunan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pembangunan

2.1.1 Pengertian Pembangunan

Menurut Ndrata (2007:35) pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang di selenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa. Sedangkan Siagian (2007:2) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Berbicara mengenai pembangunan maka kita harus mengerti apa arti pembangunan. Pembangunan adalah perubahan keadaan yang lebih baik dilaksanakan secara sadar dan terus menerus.

Seperti tercantum dalam Tap/MPR/No. II/1989 bahwa hakekat daripada pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Disini jelas terlihat bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam ikatan bangsa Indonesia yang mencerminkan situasi tersebut.

Dilihat dari uraian diatas dapatlah digambarkan betapa luasnya bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dan memerlukan partisipasi dari sebanyak mungkin seluruh penduduk Indonesia. Tetapi kadang kala perubahan tidak dilihat dari segi aspek lingkungan masyarakat tersebut, misalnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga Pembangunan yang ditetapkan itu hanya berlaku di dalam konsep, dan segala yang dicita-citakan itu hampa adanya.

Oleh sebab itu berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara. Dapat diterangkan lebih lanjut bahwa proses ini bukan merupakan proses yang mudah dan tidak tanpa gejolak maupun perasaan yang sering emosional,

mengingat bahwa titik tolak Pembangunan bangsa ialah selalu bentuk Bhinneka, dengan perbedaan dalam kebiasaan maupun tata nilai kelompok masyarakat.

Adapun pelaksanaan pembangunan yang di laksanakan di Indonesia bukanlah suatu kegiatan yang asal jadi ataupun meniru dan mengikuti mode pembangunan yang dilaksanakan di negara lain melainkan sungguh-sungguh didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan martabat masyarakat Indonesia. Hal inilah yang merupakan cita-cita dari mendirikan Negara Kesatuan RI dalam Tahun 1945. Karena itu pula kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa Indonesia. Keinginan untuk merdeka sangat erat hubungannya akan adanya suatu citra tentang masa depan, suatu citra dari bangsa Indonesia, yang ditentukan oleh pengalaman masa lampau. Sejak semula para ahli menyadari bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dan sehubungan dengan itu terbentuklah suatu citra tentang masa depan yang menjadi pendorong bagi kegiatan manusia selanjutnya.

Kita juga mengetahui bahwa pembangunan mempunyai tujuan yaitu terdiri dari jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan adanya kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang terdiri dari beberapa variabel yaitu :

1. Kepemimpinan
2. Struktur organisasi
3. Sarana dan fasilitas yang terbagai atas :
 - a. Sarana fisik
 - b. Biaya
 - c. Skill
 - d. Peraturan-peraturan dan perundangan yang melandasi tata kerja kegiatan organisasi.
4. Teknologi yaitu cara yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan di dalam proses pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan bukan saja sebagai perubahan tetapi juga sebagai :
 - a. Sebagai suatu proses evolusi.

- b. Mencakup bidang materi dan non materi yang dihubungkan dengan kemajuan teknologi.
- c. Pemikiran tentang pembangunan sebagai suatu arah gerak yang penting dalam kemajuan pembangunan secara bertahap.
- d. Adanya keterbatasan dalam pembangunan di sektor ekonomi disebabkan keterbatasan daya tampung lahan ekonominya.

2.1.2 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut Marzuki (2004) bahwa tahapan proses pembangunan desa terdiri dari: perencanaan, implementasi/pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sedangkan menurut UU. Desa No.6 Tahun 2014 (Pasal 78), tahapan pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga tahapan pembangunan desa tersebut diuraikan secara singkat berikut ini.

1. Perencanaan Pembangunan Desa. UU. No.6 Tahun 2014 (Pasal 79-80) dan PP. No.43 Tahun 2014 (Pasal 114-120) menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan desa, antara lain :
 - a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
 - c. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
 - d. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

2. Implementasi/Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan pengertian ini maka menurut Keban (2008), implementasi dapat dikatakan merupakan tahap merealisasikan tujuan- tujuan program. Berdasarkan pengertian tersebut maka tahap implementasi atau pelaksanaan pembangunan desa dapat dimaknai sebagai tahap merealisasikan tujuan-tujuan dari program-program pembangunan desa yang sudah dibuat atau ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sehubungan dengan implementasi atau pelaksanaan pembangunan desa, UU.No.6 Tahun 2014 (Pasal 81) dan PP.No.43 Tahun 2014 (Pasal 121-122) menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).
- b. Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau unsur masyarakat.
- c. Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- d. Pelaksana pembangunan desa menyampaikan laporan dalam forum musyawarah desa.
- e. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pengawasan Pembangunan Desa

Sehubungan dengan pengawasan pembangunan desa, UU.No.6 Tahun 2014 (Pasal 82) menyebutkan :

- a. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB-Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali.
- d. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.1.3 Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan, yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Selanjutnya perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Adapun jenis perencanaan desa yaitu :

1. RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. RKP Desa: Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Proses perencanaan pembangunan desa merupakan suatu kegiatan untuk menentukan arah dan strategi pembangunan desa, secara sistematis dan terarah. Proses ini meliputi beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi masalah dan potensi desa

Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah dan potensi desa. Yang meliputi pengumpulan data tentang kondisi desa saat ini, seperti tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Identifikasi potensi meliputi identifikasi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

2. Penetapan visi dan misi pembangunan desa

Visi dan misi ini merupakan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh desa dalam upaya pembangunan. Visi dan misi ini, harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang terkait, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya (RPJM Desa)

3. Penyusunan rencana strategis pembangunan desa

Rencana strategis harus didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis ini meliputi program dan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

4. Penyusunan rencana kerja

Rencana kerja ini merupakan detail dari program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana strategis. Yang meliputi jadwal pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut (RKP Desa).

5. Pelaksanaan dan evaluasi

Pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan telah mencapai tujuannya. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pihak yang terkait. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa depan.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas. Dalam pemberdayaan individu, pemberdayaan sering di samakan dengan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan individu di gambarkan bagaimana individu memilih maupun mengontrol aspek kehidupannya baik dalam pekerjaan, akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan sosial, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses perluasan asset dan kemampuan orang miskin/lemah untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan memintakan pertanggung gugatan (accountability) lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pada bagian pendekatan pemberdayaan di tunjukkan untuk mengembangkan kekuatan bagi orang miskin dalam halpengetahuan mereka, skil, nilai-nilai, inisiatif dan motivasi penyelesaian masalah, mengelola sumber daya dan reaksi keluar dari kemiskinan.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa ini. Karena cita-cita pembangunan harus berlangsung lama, berkesinambungan, dan dinamis, serta mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kejayaan bangsa Indonesia dimasa depan sangat ditentukan oleh perkembangan dan kualitas sumber daya manusianya. (Syamsuddin, 2006).

Harus diakui bangsa Indonesia masih menghadapi masalah mendasar tentang kualitas sumber daya manusia (SDM). Secara umum kehidupan kita masih diliputi lemahnya kualitas pengalaman disiplin nasional dan etos kerja. Dalam hal ini seorang manusia modern yang maju adalah yang cenderung merealisasikan segala cita, rasa, dan karyanya kedalam karya nyata. Oleh karena itu tuntutan akan kemajuan manusia Indonesia semakin mendesak. (Syamsuddin, 2006).

Pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang diharapkan unggul dan berkualitas terutama bidang ekonomi, politik, dan budaya. Dewasa ini perjuangan tidak hanya dalam satu negara. Antara satu kelompok berkuasa (minoritas) dan kelompok mayoritas (masyarakat secara umum), melainkan sudah

mencapai antar negara dan bangsa. Karena itu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting. Sehingga kehidupan bangsa di tengah-tengah berlangsungnya kemajuan peradaban, masyarakat Indonesia mampu mengimbangnya. (Raharjo, 2009:344).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata). Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pihak yang berkaitan termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan sementara itu strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian (Hikmat, 2006:21).

Partisipasi masyarakat merupakan potensi yang dapat digunakan untuk melancarkan pembangunan. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dengan kata lain pembangunan tersebut bersifat bottom up (dari bawah ke atas). Pemerintah tidak lagi berperan sebagai penyelenggara akan tetapi telah bergeser menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, ataupun mobilisator. Adapun peran dari organisasi lokal, organisasi sosial, LSM, dan kelompok masyarakat lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana program.

2.2.1. Unsur-Unsur Pemberdayaan Masyarakat

Adapun unsur-unsur dari pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi :

1. Ekonomi Kerakyatan

Negara Republik Indonesia, yang baru dilahirkan itu terombang –aming dalam dilema perjuangan fisik dan batin. Kesulitan ekonomi dihadapkan pada

persoalan global suasana perubahan yang cepat dan keras melanda hamper diseluruh wilayah bekas Hindia Belanda ini.

Pada zaman kolonial masyarakat tak punya kekuatan dan keberdayaan dalam menghadapi penjajahan. Masyarakat nyaris percaya mitos atas supremasi kulit putih. Karena dalam berbagai bidang terutama dalam bidang teknologi, bangsa kulit putih jauh melebihi kulit berwarna. Perbedaan hawa yang dingin dan panas menimbulkan adanya perbedaan dalam hal cepat dan lambannya kemajuan lahir dan batin. Hal ini mengakibatkan pribumi merasa rendah, dan menurunkan semangat perjuangan.

Dalam keadaan Negara yang masih muda, hampir semua kegiatan ekonomi menjadi macet. Bagaimana para pemimpin Indonesia mengatasinya, khususnya menguasai dan mengendalikan sumber ekonomi strategis, dari mana sumber dana perjuangan diperoleh, pelaku utama ekonomi pada masa ini, baik dari pusat maupun daerah, sejauh mana faktor non ekonomi telah menjadi faktor dominan dalam masalah perekonomian Indonesia. Sebelumnya di dalam masyarakat kapitalis terjadi pertentangan diantara kerja bersama oleh yang tak berpunya, akan hilang lenyap (fa'al, 2005:110).

Untuk menerapkannya mendasarkan pada kondisi ekonomi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari petani dan nelayan maupun buruh pabrik. Para petani pada saat itu tidak lebih daripada budak-budak belian. Negara-negara demokrasi mempunyai tatanan ekonomi yang kapitalis, dan sebagai akibatnya tidak adil dalam distribusi kekayaan. Tidak mampu menanggulangi krisis ekonomi dan penuh kontradiksi khususnya antara persamaan formal dan ketimpangan dalam bidang materi (Legge, 2003:167). Ini tidak berarti tindakan-tindakannya sudah ditentukan sebelumnya, atau bahwa negara tidak mempunyai ruang gerak untuk melakukan pilihan dan menempuh kebijakan alternatif. Keadaan buruk yang terjadi mulai awal abad 20-an tidak disangkal oleh kaum terdidik Indonesia. Mereka mulai mencari latar belakang kondisi sosial yang pincang ini dengan saling mengajukan konsep untuk penyelesaiannya. Mereka berpendapat bahwa penyebab kesengsaraan rakyat Indonesia adalah akibat struktur kemasyarakatan yang ada. Yaitu masyarakat jajahan yang diperas oleh kaum kapitalis (Gie, 2005:23).

Dengan kekuatan uang mereka (penjajah belanda) berhasil mengeruk kekayaan Indonesia, sekaligus memeras rakyat. Akibatnya meningkatnya kriminalitas di kalangan rakyat Indonesia, sehingga menjadi persoalan dalam negeri. Kesengsaraan tersebut menjadi makin berat dengan adanya peperangan (perang dunia I). Perang tersebut disebabkan adanya persaingan antara kepentingan kaum kapasitas Eropa (Inggris dan Jerman) Disamping faktor-faktor dari luar (ekonomi global), faktor politik ternyata peranannya besar sekali dalam mengubah sistem ekonomi (Mubyarto, 2000:75).

Misalnya di Indonesia kerusakan lingkungan, energi tenaga listrik yang dapat mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan perekonomian. Ini yang masih menjadi kendala bagi bangsa Indonesia. Masalah lain yang menghantui perkembangan ekonomi dan politik negara- negara Asia adalah tingkat ramuan demokrasi yang dianggap “pas” bagi negara- negara tersebut. Termasuk Negara Indonesia, dalam menerapkan konsep demokrasi. Apakah demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, atau banyak demokrasi.

2. Teknologi Berbasis Kerakyatan

Kemajuan ekonomi biasanya berlaku sejalan dengan spesialisasi keahlian dan perkembangan manusia. Karena itu globalisasi ekonomi adalah nyata. Dan tidak hanya merupakan kelanjutan, atau kebalikan dan kecenderungan-kecenderungan tahun-tahun sebelumnya. Sementara masih banyak perdagangan yang masih bersifat regional ada pula yang perekonomian yang bersifat global, di tingkat pasar keuangan. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan, dalam hal ini perubahan tidak hanya diharapkan akan terjadi dalam taraf kehidupan masyarakat. Akan tetapi juga diharapkan terjadi pula kemajuan pada peranan dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini, peran negara, negara berkembang termasuk Indonesia, Negara masih mempunyai peranan penting atau tanggungjawab terhadap ekonomi rakyatnya. Karena negara tidak hanya membiayai akan tetapi juga merencanakan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat (ekonomi kerakyatan). Serta masyarakat, dan alat produksi. Dalam arti kemampuan masyarakat untuk menciptakan pembangunan, mau melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang berasal

dari usaha mereka sendiri maupun dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat (Swarsono, 2004:224).

Di negara- keberadaan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen yang hanya menerima hasil pembangunan, yang dibiayai oleh negara. Tetapi masyarakat juga ikut peran serta / partisipasi di dalamnya. Dari sudut sejarah pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan pedesaan. Munculnya negara sebagai suatu kekuatan yang dominan dalam proses pembangunan dimulai sejak abad ke-19. Yaitu semasa pemerintah colonial Belanda dengan kebijakan ekonomi yang kita (rakyat Indonesia) dikenal dengan tanam paksa. Apa yang dapat masyarakat pahami dalam hubungan dengan system ekonomi warisan kolonial ini. Dalam keadaan yang paling dirasakan sampai hari ini, ternyata sistem serta kebijakan yang diterapkan oleh kolonialisme masih membungkam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan tenaga bukan manusia, yang berkaitan erat dengan industrialisasi ialah tingkat distribusi tenaga manusia dan dalam sektor perdagangan. Di dalam masyarakat pedesaan, penguasaan tanah masih ukuran terhadap tinggi rendahnya status seseorang.

Dengan makin kuatnya pengaruh dari luar peranan penguasaan tanah terhadap penentuan status semakin berkurang. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah bercocok tanam, maka ada kecenderungan bahwa sektor pertanian, merupakan pekerjaan paling besar serta menampung tenaga kerja. Selain itu masih minimnya keahlian pada seseorang di luar pertanian. Pentingnya suatu skill kependudukan itu untuk memperlihatkan persamaan ciri penduduk dan kesejahteraan negara. Memang tidak dapat dikatakan tradisi kemerdekaan itu menyediakan suasana yang lebih baik. Karena kolonialisme setidaknya memberikan penjelasan tentang kebijakan ekonomi. Menjelaskan tentang kemiskinan, dalam segala hal. Masyarakat harus mampu berusaha untuk mengatasinya. Hal ini memang berlainan dengan asumsi-asumsi yang barang kali datang dari perempat dunia.

Berbagai alasan telah dikemukakan mengenai kelebihan dari system kolonial dengan yang lain. Akan tetapi setidaknya kita mampu memberikan konsep dan metode yang sesuai dengan kondisi lokalitas kebudayaan kita, bukan kolonial Belanda. Yang bangsa Indonesia inginkan adalah motivasi ekonomi.

Masyarakat menginginkan setiap orang turut ambil bagian dalam kehidupan ekonomi berdasarkan kepercayaan atas tekanan dan ketakutan.

3. Pendidikan

Warisan kolonial di bidang pendidikan perl di lihat dari dua tingkat : pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan langkah minimal yang diperlukan untuk bertindak secara efektif dalam suasana barat. Sedangkan pendidikan menengah dianggap penting bagi pembangunan politik ekonomi. Rakyat Indonesia membutuhkan komitmen untuk membangun dunia tanpa perang dan tentara. Konsep ini memang utopis untuk beberapa tahun kita perang untuk perumahan. Sekarang masyarakat harus belajar kalau ingin kaya. Hal ini sangat diperlukan disiplin. Kedisiplinan merupakan sesuatu hal yang benar-benar baru. Seiring dengan semakin pendeknya jarak, demikian juga perbedaan- perbedaan kita seakan-akan semakin menghilang. Sebagaimana yang dalam Bhineka Tunggal Ika (suku, ras dan agama), ini harus kita lihat secara nyata. Pentinnya membangun sebuah era baru yang seimbang, penuh kepedulian sosial dan tanggung jawab sejarah. Misalnya di sekolah kuno, umumnya hanya mengajarkan dua formasi pendidikan untuk anak-anak. Mereka diajari esensi ilmu pengetahuan alam dan gagasan tentang hak-hak dan tugas-tugas sipil. Karena kerja adalah metode spesifik manusia yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan alami dalam rangka mengubah dan mensosialisasikan lebih mendalam dan lebih luas. Penjajah Belanda mengajarkan sebuah pandangan yang lebih modern berdasarkan kesadaran atas kenyataan sederhana dan mendasar bahwa hukum-hukum dalam obyektif. Hal ini tidak mudah ditangani di mana manusia harus menyesuaikan dirinya, jika ia hendak menguasai hukum tersebut.

Jadi seseorang dapat mengatakan prinsip pendidikan yang merupakan basis sekolah adalah didasarkan atas gagasan tentang kerja. Sebenarnya struktur alam dan hukumnya merupakan sesuatu yang membatasi secara absolut jangkauan imajinasi. Ia harus menjadi kebutuhan yang dikenali dan diusulkan untuk mereka sendiri sebagai kebebasan, dan bukan hanya hasil dari keterbatasan.

2.2.2 Sasaran Pemberdayaan masyarakat

Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Berikut ini merupakan program – program pemerintah Desa Amin Jaya dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa
Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dipemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.
2. Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan
Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.
3. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi
Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan / permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Kemudian, perlu dilakukan keberpihakan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangannya memperoleh dukungan sumberdaya yang cukup. Mengutip Syafar (2015: 149)

bahwa pemberdayaan masyarakat berangkat dari potensi komunitas dan dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang berkepentingan membangun masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan program pemerintah desa dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kinerja agar lebih cepat dan akurat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pengembangan teknologi, dan penggunaan teknologi dalam proses kerja dan kehidupan masyarakat. dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat, memudahkan masyarakat dalam bekerja, serta memudahkan masyarakat untuk berbagi dan mendapatkan informasi.
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
6. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan

lain-lain. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dahama dan Bhatnagar dalam Mardikanto (2010) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup:

1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
4. Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
5. Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dan penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini, bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan masyarakat sasarnya.
7. Belajar sambil bekerja, artinya kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau

belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui kegiatan secara nyata.

8. Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan (lingkungan fisik, ekonomi dan nilai sosial budaya) sarannya.
9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan.
10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).
11. Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:
 - a. Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga.
 - b. Setiap anggota keluarga memiliki peran atau pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.
 - c. Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama.
 - d. Pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga.
 - e. Pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani.

- f. Pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda.
 - g. Pemberdayaan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya.
 - h. Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.
12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

2.3. Desa

Pada umumnya desa dikaitkan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Rahadjo, 2010 : 29) sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serta informasi satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian. Sedangkan menurut Koentjaraningrat desa adalah suatu komunitas kecil yang menetap secara tetap di suatu tempat, masyarakat desa itu sendiri mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren mereka menggambarkan karakteristik masyarakat desa sebagai berikut (Leibo,2007:7)

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng
4. Homogen
5. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
6. Populasi anak dalam proporsi yang lebih

Menurut pendapat dari Pitirim dalam Leibo (3005:9) yang mengemukakan faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan karakteristik masyarakat desa dan kota yaitu:

1. Mata pencaharian
2. Ukuran komunitas
3. Tingkat kepadatan penduduk
4. Lingkungan
5. Diferensiasi social
6. Stratifikasi social
7. Solidaritas sosial

Karakteristik desa sangat diperlukan adanya pembagian desa atau biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan mudah diketahui jika dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni oleh masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembagiannya sebagai berikut (Leibo, 2005:18).

1. Desa Pertanian

Pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian.

2. Desa Industri

Pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik industri kecil maupun industri besar.

3. Desa Nelayan atau Desa Pantai

Pada jenis desa ini pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan baik perikanan laut, pantai, maupun darat.

4. Desa Pariwisata

Pada jenis desa ini terdapat objek wisata seperti peninggalan-peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, dan juga terdapat keindahan alam.

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih tergolong masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya masyarakat petani masih

dianggap secara umum yang mana mereka dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan yang lain. Kenyataannya malah berbanding terbalik dimana masing-masing petani memiliki ciri yang berbeda misalnya saja pada tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang ditanam, teknologi atau alat-alat pertanian yang mereka pergunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, dan juga topografi atau bentuk kondisi fisik geografiknya.

Masyarakat petani bisa dibagi menjadi dua yaitu antara masyarakat petani tradisional dan petani modern, yang membedakan antara keduanya adalah bagi kelompok petani yang pertama mereka masih tergantung dan ditentukan oleh alam karena masih rendahnya teknologi dan pengetahuan mereka. Produksi yang mereka hasilkan hanya untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi keluarganya, dan tidak mengejar keuntungan sedangkan kelompok petani yang kedua mereka lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan, mereka juga menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan yang modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran (Rahardjo, 2010:63).

Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan suatu hasil produk dari besar kecilnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang bergantung pada alam itu sendiri. Besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan sebagai berikut:

1. Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian
2. Sejauh mana tingkat teknologi yang mereka miliki
3. Sejauh mana sistem produksi yang diterapkan

Ketiga faktor diatas menjadikan faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional masyarakat desa yang artinya kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakatnya sangat tergantung pada pertanian, tingkat teknologi yang rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Rahardjo, 2010:66). Pola pemukiman penduduk suatu desa merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana keterkaitan antara struktur fisik desa dengan pola kehidupan internal masyarakatnya. Menurut P.H Landis membagi menjadi empat pola pemukiman penduduk yaitu (Rahardjo, 2010:99).

1. *The Form Village Type (FVT)*

Pola pemukiman ini biasanya para keluarga petani atau penduduk tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian beradadi luar lokasi pemukiman.

2. *The Nebulous Farm Type (NFT)*

Pola ini hampir sama dengan pola FVT bedanya disamping ada yang tinggal bersama disuatu tempat terdapat penduduk yang tinggal tersebar di luar pemukiman itu, lahan pertanian juga berada di luar pemukiman itu.

3. *The Arranged Isolated Farm Type (AIFT)*

Pola pemukiman ini dimana penduduknya tinggal disekitar jalan dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka dengan suatu trade center diantara mereka.

4. *The Pure Isolated Farm Type (PIFT)*

Pola pemukiman ini penduduknya tinggal dalam lahan pertanian mereka masing-masing terpisah dan berjauhan satu sama lain dengan suatu trade center.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

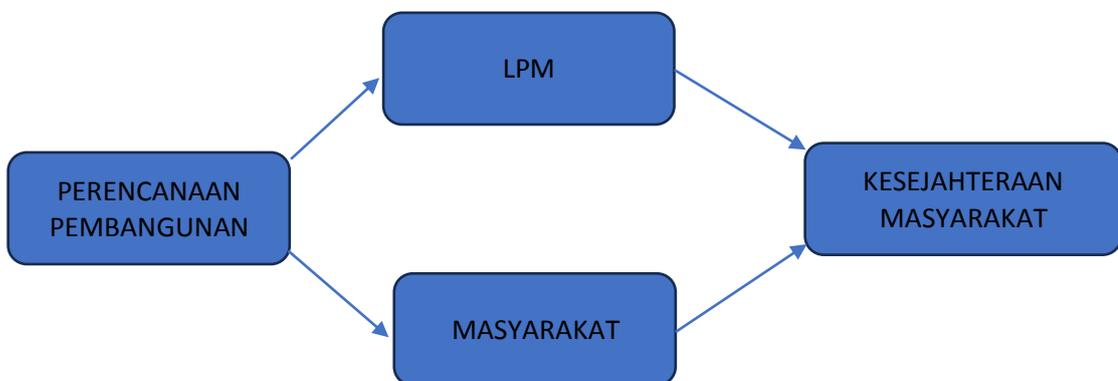
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2006).

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistic. Objek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakana. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah

data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2008).

3.2 Kerangka Konsep

Dapat dilihat dari penelitian dahulu bahwa banyak variabel-variabel yang sudah diteliti lebih dahulu dengan hasil yang berbeda. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pembangunan Desa adalah pemberdayaan Masyarakat. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat sangat diharapkan dapat terwujud untuk membantu dalam pembangunan di Desa.



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Defenisi Konsep

Hakikat daripada pembangunan adalah bagaimana pembangunan yang ada dapat mempengaruhi dan memperbaharui sumber daya manusia yang ada di suatu tempat, daerah hingga di pedesaan sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat itu sendiri dan akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat. Berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara. Dapat diterangkan lebih lanjut bahwa proess ini bukan merupakan proses yang mudah dan tidak tanpa gejolak maupun perasaan yang sering emosional, mengingat bahwa titik

tolak Pembangunan bangsa ialah selalu bentuk Bhinneka, dengan perbedaan dalam kebiasaan maupun tata nilai kelompok masyarakat.

Dilihat dari uraian diatas dapatlah digambarkan betapa luasnya bidang- bidang pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dan memerlukan partisipasi dari sebanyak mungkin seluruh penduduk Indonesia. Tetapi kadang kala perubahan tidak dilihat dari segi aspek lingkungan masyarakat tersebut, misalnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga Pembangunan yang ditetapkan itu hanya berlaku di dalam konsep, dan segala yang dicita-citakan itu hampa adanya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi	Indikator
Perencanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Aparatur Desa 2. Kekayaan dan Keuangan Desa 3. Sarana perekonomian Desa 4. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat 5. Kesejahteraan Masyarakat 6. Pendidikan Masyarakat 7. Kesehatan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang terencana dan kolektif. 2. Memperbaiki kehidupan masyarakat. 3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung 4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

Berdasarkan kategorisasi penelitian dan indikator diatas diharap dapat memberikan dan membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi

oleh pemerintah desa dan masyarakat yang ada di suatu desa. Meningkatkan sumber daya manusia dengan kebijakan dan kegiatan yang positif yang dibuat pemerintah desa diharapkan akan menambah ilmu, pengalaman dan skill dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan kehidupannya masing-masing.

3.5 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan baik kepada Pemerintahan Desa Simodong dengan Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat. Adapun subjek dan informan penelitian ini ialah Pemerintahan Desa Simodong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Simodong, dan masyarakat Desa Simodong.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. (Nana Syaodih, 2013)

Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian untuk mengoptimalkan data mengenai kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintahan Desa Simodong dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Simodong.

3.6.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut (Lexy Moloeng, 2005).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber (Nana Syaodih, 2013).

Dokumen yang akan dikumpulkan berupa dokumen-dokumen tentang peraturan Pemerintahan Desa Simodong dan program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Simodong.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2002), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dengan demikian maka data-data yang lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Sedangkan menurut Taylor (1975), data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan

verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data data terkumpul.

3.7.1 Pengumpulan Data

Menggali informasi dan data dari berbagai sumber atau responden. yaitu dengan wawancara, observasi, analisis dokumen dan foto-foto kegiatan yang ada.

3.7.2 Reduksi Data

Dalam reduksi data, data yang diperoleh disortir karena data dari hasil wawancara merupakan data yang memiliki sifat sangat luas informasinya bahkan masih mentah (Lexy J. Moleong, 2002). Dengan ini kita akan bisa memilih laporan hasil wawancara yang lebih penting, jadi bila ada hasil laporan yang dirasa kurang penting bisa dibuang.

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melakukan editing, pengelompokkan, dan meringkas data. Tahap kedua, menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal berkaitan dengan data yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menentukan temamema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Pada tahap terakhir dari reduksi data adalah menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan- penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok yang bersangkutan.

3.7.3 Penyajian Data

Hasil dari pengorganisasian data yang di sajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa diskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap data dalam wawancara.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menyangkut intepretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang kredibilitas dan objektifnya terjamin. Verifikasi bisa berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau bisa berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan di bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pengamatan lapangan yaitu karena terjadinya perselisihan antara Pemerintahan desa dengan Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menerangkan data dan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada informan sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Kemudian peneliti juga memakai teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana suatu proses pembangunan mempengaruhi tingkat kesejahteraan Masyarakat di desa. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan orang atau perilaku yang diamati.

4.1 Profil Lokasi Penelitian

Simodong merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu bara Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.1. Profil Lokasi Penelitian

No	Lokasi	Desa Simodong
1	Alamat	Jl. Sangkot Lubis No 11
2	Kecamatan	Sei Suka
3	Kabupaten	Batu Bara
4	Kode Pos	21257
5	Kepala Desa	HELMI

4.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simodong

No	Nama	Jabatan
1	Helmi	Kepala Desa
2	M. Yakub	Sekretaris Desa
3	Lili Kusuma	Kaur Perencanaan Pembangunan
4	Hujjatun Hikmah	Kaur Umum dan tata Usaha
5	Kliwon	Kaur Keuangan
6	Siti Aminah Hsb	Kasi Pemerintahan
7	Dorlan E. Siahaan	Kasi Kesejahteraan
9	Ajeng Sisi Ayuni	Kasi Pelayanan
10	Fahrul	Operator
11	Suriyanto	Kadus I
12	Zainuddin Ritonga	Kadus II
13	Damos Op. Sunggu	Kadus III

14	Elon Raja Gukguk	Kadus IV
15	Darwis Sihite	Kadus V
16	Ovenry R. Sinaga	Kadus VI
17	Mian Lamhot Huta Gaol	Kadus VII

4.2 Peran Masyarakat terhadap Pembangunan

Sebagaimana kita tahu, saat ini, partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengakaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan pemerintah.

Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini.

Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul bisa jadi karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka.

Sama halnya yang terjadi di Desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, berdasarkan observasi yang dilakukan kepada Pemerintah Desa Simodong perihal peran masyarakat terhadap pembangunan desa, sekretaris Desa Simodong yaitu bapak M. Yakub menyatakan peran masyarakat di Desa Simodong terhadap pembangunan desa dapat dikatakan aktif dan ikut serta terlibat dalam pembangunan. Ketika adanya rencana pembangunan di desa masyarakat dilibatkan dalam forum rapat Musrenbang.

Tidak hanya masyarakat umum saja yang dilibatkan melainkan juga ada lembaga lembaga yang ada di desa seperti LPM, BUMDes, Badan Desa dan beberapa Lembaga desa lainnya. Senada yang dikatakan oleh sekretaris desa pengurus BUMDes Desa Simodong menyatakan benar adanya proses pembangunan desa yang didasarkan oleh rencana pemabangunan desa bahwasanya seluruh elemen yang ada didesa dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANGDES). Hasil yang didapat dalam kegiatan tersebut akan dijadikan program dalam 1 (satu) tahun kedepannya sehingga program program tersebut juga akan didukung oleh :

1. Kualitas dan kapasitas aparatur Desa

Kualitas aparatur desa sangat mempengaruhi terhadap proses pembangunan desa, dengan kemampuan yang menghuni dari aparatur desa program program yang sudah direncanakan dan yang sudah ditetapkan akan berjalan dengan baik, dari tahapan perencanaan, realisasi program dan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintahan desa.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh beberapa masyarakat desa, mereka senada menyatakan bahwa pemerintahan Desa Simodong memiliki aparatur kualitas yang baik dalam melaksanakan proses pembangunan desa. terlihat dari terlaksananya pembangunan didesa seperti pembangunan sarana dan prasaranan di desa. Terkhusus di Desa Simodong yang merupakan desa dengan masyarakat yang mayoritas adalah petani. Adanya pembangunan irigasi perairan sawah dengan kualitas bangunan yang baik, subsidi pupuk, pembentukan kelompok tani merupakan salah satu contoh pengawasan dan agenda yang dilakukan pemerintah desa. Apabila kulaitas aparatur desa yang kurang baik maka beberapa program yang sudah dibuat tidak akan terlaksana dan pengawasan juga tidak optimal.

2. Kekayaan dan Keuangan Desa

Kekayaan atau sumber keuangan desa yang dimiliki oleh desa simodong dalam proses pembangunan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dengan kemampuan keuangan desa yang memadai seharusnya pembangunan yang ada di desa tidak akan terhambat oleh jumlah dana desa yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa bapak yakub menyatakan bahwa sumber kekayaan dan keuangan di desa simodong berdasarkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Dalam konteks pembangunan yang ada didesa keseluruhan pembangunan yang ada didesa sepenuhnya didanai oleh alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD).

3. Sarana Perekonomian Desa

Sebagian besar perekonomian desa Simodong berasal dari jual beli hasil pertanian, hasil pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar warga desa Simodong, dengan adanya sarana prasarana yang ada akan berdampak terhadap hasil panen dan hilirisasi hasil panen pertanian. Didukung oleh kelompok tani yang ada didesa juga berdampak terhadap hasil dan pemasaran hasil panen warga, dengan adanya Kelompok tani akan memperkuat Kerjasama baik diantara sesama petani maupun dengan pihak lain sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman , tantangan, hambatan serta saling menungtungkan.

Menurut Sekretaris Desa bapak M. Yakub menyatakan ± 60 % warga Simodong adalah petani, berarti keberlangsungan hidup Sebagian besar warga simodong bergantung oleh hasil pertanian mereka. Pemerintah desa Simodong sudah melakukan kinerja yang maksimal dalam mendukung kegiatan pertanian yang ada didesa, seperti membangun akses jalan yang baik menuju area pertanian, membangun irigasi yang baik di area pertanian serta memberikan izin subsidi bahan bahan pertaniann seperti bibit unggul, racun dan pupuk.

4. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam sebuah perencanaan partisipatif dan bertujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung oleh kelembagaan yang berkelanjutan pula. Dalam proses menuju kelembagaan yang berkelanjutan tersebut perlu dilakukan pengutan kelembagaan lokal yang didukung penuh oleh kapital sosial. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pemikiran, keahlian, waktu, modal dan materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Selanjutnya sekretaris desa bapak M. Yakub menyatakan partisipasi masyarakat yang ada di desa simodong dapat dikatakan tinggi, dengan tingkat kehadiran Ketika awal musyawarah desa hingga melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di desa ini. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat (LPM) yang ada di desa simodong ini juga merupakan salah satu pelaksana dalam pembangunan yang ada di desa simodong. Sehingga masyarakat dan Lembaga yang ada di desa terlibat terhadap proses pembangunan yang ada di Desa Simodong.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan. Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Dalam hal kesejahteraan masyarakat, di desa Simodong tingkat kesejahteraan masyarakatnya Sebagian besar dapat digolongkan mampu, sehingga dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat, orang tua dapat memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak anaknya, memberikan kehidupan yang layak serta memberikan makanan yang baik sehingga hal tersebut akan berdampak kepada pembangunan desa ucap bapak M. aykub Selaku sekretaris Desa Simodong.

6. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Kita tidak bisa memungkirinya bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sangatlah besar, meskipun hasilnya tidak bisa kita lihat dengan segera. Tapi ada jarak penantian yang cukup lama antara proses dimulainya usaha dengan hasil yang ingin dicapai.

Kualitas Pendidikan yang dimiliki masyarakat akan mempengaruhi bagaimana cara dia berfikir kritis memberikan masukan dan memberi solusi terhadap permasalahan pembangunan yang ada. Sekretaris Desa Simodong menyatakan di desa simodong ini tingkat Pendidikan masyarakatnya sudah merata minimal Sekolah Menengah Atas ada pula yang sudah berpendidikan Strata-1 bahkan ada yang Strata-

2. Kenyataan yang ada dilapangan bahwa mereka yang berpendidikan memiliki kontribusi yang baik untuk desa ini, mereka sering memberikan masukan terhadap kebijakan desa terutama dalam proses pembangunan desa. Karena mereka berfikir sudah saatnya mereka berkontribusi agar desa mereka dapat berkembang kearah yang lebih baik.

Selain itu program PKH yang diberikan pemerintah juga sangat membantu bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga keluarga yang kurang mampu dapat memberikan Pendidikan kepada anaknyan hingga ketingkat sekolah menengah atas.

7. Kesehatan Masyarakat

Hubungan antara Kesehatan masyarakat dengan pembangunan sangat jelas dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena masyarakat yang sehat dapat memiliki pendidikan yang lebih baik, produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi, pendapatan dan tabungan yang lebih baik, perilaku dan kondisi hidup yang lebih sehat, serta stabilitas sosial yang lebih stabil. Pembangunan kesehatan di Indonesia harus menjadi prioritas agar pembangunan nasional berhasil. Pembangunan nasional yang tidak memperhatikan pembangunan kesehatan, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan nasional yang memperhatikan kesehatan.

Perihal kesehatan masyarakat di desa Simodong, Sekretaris Desa Simodong bapak M. Yakub menyatakan fasilitas Kesehatan di desa ini cukup memadai. Kesehatan masyarakat sejak dari bayi sudah diperhatikan seperti tersedianya Posyandu yang di peruntukkan untuk anak dan ibu, memperhatikan dan memantau perkembangan anak dan ibu, selain itu di Desa Simodong ini juga memiliki kader posyandu yang aktif setiap dusunnya sehingga pengawasan terhadap warga terutama anak dan ibu dapat diawasi dengan baik. Selanjutnya selain posyandu desa simodong juga memiliki fasilitas kesehatan Puskesmas sehingga masyarakat Desa Simodong bisa datang dan berkonsultasi tentang kesehatan kepada petugas Puskesmas di desa ini sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya Sekretaris Desa Simodong menyatakan bahwa dengan tingkat kesehatan yang baik yang dimiliki masyarakat desa akan mempengaruhi pembangunan yang ada di Desa Simodong ini.

4.3 Proses Pembangunan Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan merupakan suatu hal yang akan mempengaruhi maju tidaknya suatu roda pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah maupun desa, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah suatu kegiatan yang asal jadi ataupun meniru dan mengikuti mode pembangunan yang dilaksanakan di negara lain melainkan sungguh-sungguh didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan martabat masyarakat Indonesia. Hal inilah yang merupakan cita-cita dari mendirikan Negara Kesatuan RI dalam Tahun 1945.

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Perspektif kearah pencapaian pembangunan nasional juga diuraikan secara garis besar di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional sebagai suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan nasional mencakup pula upaya peningkatan semua aspek kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan ideologi.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata). Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pihak yang berkaitan termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral

pembangunan sementara itu strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian.

Indikator dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Kegiatan yang Terencana dan Kolektif

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Proses ini dapat terjadi jika masyarakat ikut berpartisipasi. Pemberdayaan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya kesehatan atau ekonomi. Biasanya, pola pemberdayaan disesuaikan dengan latar belakang masyarakat yang akan diberdayakan.

Kegiatan yang terencana akan memberikan dampak yang positif bagi proses pemberdayaan masyarakat. Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat apabila memiliki sikap yang partisipatif, artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya, pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas. Kemudian perihal kegiatan yang terencana yang dibuat oleh Pemerintah Desa Simodong dalam hal menuju pemberdayaan masyarakat, Sekretaris Desa Simodong Bapak M. Yakub mengatakan kegiatan kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Simodong yaitu seperti melakukan pelatihan pelatihan seperti kerajinan tangan sehingga masyarakat dapat mandiri.

Selanjutnya Sekretaris Desa Simodong bapak M. yakub menuturkan bahwa berhubung Desa Simodong ini masyarakatnya mayoritas adalah petani pemerintah desa Simodong melaksanakan kegiatan kegiatan pelatihan tentang pertanian, mengundang narasumber untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang pertanian hingga terus berkomunikasi dengan Dinas terkait dalam hal dukungan dan perizinan tentang pertanian.

2. Memperbaiki Kehidupan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, sebab anggota masyarakat tidak memiliki kekuatan dan akses untuk menuntut hak dan kewajiban terhadap berbagai fasilitas dan sarana yang berkembang pesat, seperti hukum, kesehatan, pendidikan, informasi, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai

upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan keadaan dan potensi yang ada di dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang dilakukan. Masyarakat dapat ikut berperan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan, yaitu dengan memberikan pendapat, saran, kritik, dan dukungan terhadap suatu kebijakan. Pemberdayaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa didukung beberapa faktor salah satunya yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat.

Perbaikan kehidupan masyarakat menjadi prioritas bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita suatu pemerintahan desa yaitu memberdayakan masyarakat desanya. Dalam hal ini Sekretaris Desa Simodong Bapak M. Yakub menuturkan dalam hal memperbaiki kehidupan masyarakat desa, pemerintah Desa Simodong mendukung setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat desa. Pemerintah desa Simodong memberikan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam bersosialisasi terhadap sesama masyarakat, mempermudah akses dengan tujuan pasar, lokasi kerja, lokasi pendidikan dan lokasi lokasi lainnya. Selanjutnya beliau menuturkan dengan sarana dan prasarana yang baik akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik.

3. Prioritas bagi Kelompok Lemah atau Kurang Beruntung.

Pada masa lalu masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran modern masa kini masyarakat miskin dikategorikan kepada mereka yang tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern ini.

Masalah sosial, terutama kemiskinan adalah suatu permasalahan yang kompleks serta menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia. Dengan jumlah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya sangat cukup untuk mensejahterakan rakyatnya, namun masalah sosial atau kemiskinan justru menjadi masalah diantara banyaknya potensi dan kekayaan alam yang berlimpah tersebut. Hal itu yang kemudian memicu munculnya suatu pertanyaan, apakah memang benar

bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah kemiskinan atau mungkin adalah masalah ketidakadilan distribusi kekayaan? Berkaitan dengan kondisi itu, pemberdayaan masyarakat dianggap dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sosial. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui berbagai cara dan elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha ataupun masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Walaupun dengan cara pandang yang berbeda, tetap saja program pemberdayaan tersebut memiliki tujuan yang sama yakni sebagai usaha untuk menyelesaikan atau paling tidak untuk mengurangi dampak masalah sosial. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah usaha penciptaan suasana yang memungkinkan berkembangnya (enabling) potensi suatu masyarakat.

Dalam hal prioritas terhadap masyarakat yang kurang beruntung (miskin) dalam proses pemberdayaan masyarakat, Sekretaris Desa Simodong menyatakan bahwa Pemerintah Desa Simodong membuat Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan sasaran yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah sehingga dengan adanya bantuan langsung tunai berupa uang dan bahan pokok makanan akan membantu masyarakat dengan kondisi lemah ekonomi (miskin) dapat menjamin keberlangsungan hidupnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memaksimalkan program-program yang sudah diberikan pemerintah desa Simodong sehingga berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat itu sendiri.

4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep peningkatan kapasitas.

Peningkatan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya peningkatan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa

dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Wilson (2006) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya.

Dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat pemerintah Desa Simodong Bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melaksanakan beberapa program yang nantinya akan membangun jiwa wirausaha kepada masyarakat Desa Simodong, program-program yang dilakukan yaitu adanya daur ulang sampah yang dijadikan bahan kesenian seperti tas dompet dari bahan plastik. Selanjutnya peningkatan kualitas masyarakat juga dirasakan oleh para petani, petani saat ini tidak hanya bekerja menanam, memupuk, menjaga tanaman padi lalu panen, namun saat ini para petani juga terdorong untuk mengikuti mederenisasi zaman seperti membentuk kelompok tani, sehingga dengan adanya kelompok tani, para petani akan memiliki pemikiran yang luas dan mampu membuat kegiatan-kegiatan yang positif saling bertukar fikiran yang akan berdampak kepada hasil pertanian mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Pemerintah Desa Simodong, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) serta mengumpulkan informasi dari masyarakat Desa Simodong perihal proses pembangunan desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Simodong.

Pemberdayaan merupakan suatu proses menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat berkompetisi secara efektif dengan kelompok kepentingan lainnya dengan cara menolong mereka untuk belajar menggunakan pendekatan lobil, menggunakan media, terlibat dalam aksi politik, memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat bekerja secara sistematis, dan lain-lain. Pemberdayaan adalah sebuah politik pembangunan alternatif yang menekankan keutamaan politik sebagai sarana pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Berdasarkan Hasil Penelitian dilapangan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dapat disimpulkan bahwa, perencanaan pembangunan yang ada di Desa Simodong dapat dikatakan baik. Hal tersebut terlihat dari proses perencanaan pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil Musyyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) kemudian disepakati bersama atas usulan-usulan yang diberikan baik dari masyarakat, BUMDes, LPM dan unsur-unsur lainnya, seperti tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Simodong juga dapat dikatakan cukup baik, hanya saja masih adanya kurang koordinasi yang di lakukan Pemerintah Desa Simodong dengan beberapa Unsur-Unsur yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang selama ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya Ketika adanya proses pembangunan di desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lah yang melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Simodong sudah melaksanakan program-program yang sudah maksimal, dimana beberapa program yang dilaksanakan pemerintah Desa sudah tepat sasaran, membangun sarana dan prasarana seperti irigasi dan pembangunan akses jalan yang memadai yang bertujuan

untuk membantu masyarakat desa yang mayoritas adalah petani, sehingga dengan terciptanya sarana dan prasarana tersebut memudahkan dan membantu para petani dalam menjalankan kegiatan pertaniannya dimulai dari pembajakan, pembibitan, tanam dan panen.

Selanjutnya program pemberdayaan masyarakat juga diberikan melalui tersedianya fasilitas kesehatan yang ada di desa seperti POSYANDU dan PUSKESMAS sehingga kesehatan masyarakat umum, ibu hamil, anak bayi dapat dipantau secara bertahap. Seterusnya program pemberdayaan masyarakat juga terdapat pada kemakmuran masyarakat seperti adanya bantuan secara langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program PKH yang nantinya akan membantu masyarakat dalam menjamin kehidupannya serta menjamin pendidikan anak-anak mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang ini peneliti sampaikan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Dalam proses pembangunan, peneliti menyarankan bahwasanya pemerintah Desa Simodong lebih memberikan ruang kepada masyarakat agar aspirasi yang ada dapat tertampung dan dapat dibahas secara bersama-sama. Tidak hanya melalui kegiatan MUSRENBANGDes saja, dikarenakan kegiatan MUSRENBANGDes hanya bersifat perwakilan warga saja. Selanjutnya masyarakat juga dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan memberikan bahan evaluasi kepada Pemerintah Desa Simodong.
2. Lebih mengkatifkan peran Lembaga-lembaga yang ada di Desa. Sehingga dalam proses pembangunan, pemerintah Desa Simodong dapat terbantu. Selain itu Pemerintah Desa Simodong, Khususnya Kepala Desa dapat meminimalisir permasalahan yang ada dan mengambil solusi yang terbaik antara Aparatur Desa dengan Lembaga-Lemabaga yang ada di Desa Simodong, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Lembaga-lembaga lainnya.

3. Perihal pemberdayaan masyarakat peneliti dapat menyarankan agar pemerintah Desa Simodong lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, walaupun dapat dikatakan bahwasanya pelayanan yang ada di Desa Simdong ini cukup baik, namun dengan adanya perubahan-perubahan yang terus terjadi haruslah Pemerintah Desa Simodong terus berbenanah kearah yang lebih baik, dan menampung aspirasi dari masyarakat.
4. Lemabaga-lembaga yang ada di Desa Simodong seperti LPM dan BUMDes diharapkan lebih aktif dalam membantu peran Pemerintah Desa Simodong, sehingga dengan terjalinnya hubungan yang baik akan berdampak positif pula pelayanan terhadap masyarakat di Desa Simodong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Expert.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Hikmat, Harry. (2010) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press
- Keban, Yermias, T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Leibo Jefta. (1995). *Sosiologi Pedesaan (Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lexy J. Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki M., 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif, Modul PKM*, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Mubyarto, (2000) *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi III LP3ES* : Jakarta
- Ndrata, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya
- Prof. Dr. Mubyarto dan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo. 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Samsudin, sadili. (2006), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan ke-1 Bandung : Pustaka Setia
- Siagian, Sondang, P. 2007. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto Usman, 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.



UMSU
Cerdas | Terpercaya

Unggah karya sun of the paper diunggah dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Medan,20.....

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : QOPY APFAM
N P M : 1803090030
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Proses perencanaan pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di desa Simodong, kecamatan Sei-Suka, kab. Batubara	AEC
2	pengelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap anak yatim di desa Simodong	X
3	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa Simodong	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 15 Maret2023.

Ketua

Program Studi. Kes. Sos.

(Dr. H. Mujahidin, S. Sos. M. Si)
NIDN: 07 28088902

Pemohon,

(..... QOPY APFAM) (.....)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi. Kes. Sos.

(Dr. H. Mujahidin, S. Sos. M. Si)
NIDN: 07 28088902





UMSU

Cerdas | Terpercaya

Unggahlah surat ini agar lebih akurat dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 693/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **15 Maret 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **QORY ARFAN**
N P M : 1803090030
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA**
Pembimbing : **Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 050.18.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Maret 2024.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 21 Syawal 1444 H
12 Mei 2023 M

Dekan

Dr. ARIEIN SALEH, S.Sos., MSP.
IDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth. Medan,20....
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : GORY ARFAN
 N P M : 1803090030
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

~~PROSES~~ PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA
 PEMBEKALAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG
 KECAMATAN SEI-SUKA KABUPATEN BATUBARA

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Dr. H. Mujahidin, S.Sos, M.P.
 NIDN: 018008902

Pemohon,

GORY ARFAN
 (... GORY ARFAN ...)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1245/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
Waktu : 09.45 WIB s.d. Selesai
Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	CORY ARFAN	1803090030	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATTU BARA
2	A. MALIK SAM SIREGAR	1903090009	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Drs. SHOHBIL ANSHOR SRG., M.Si	EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA DI LINGKUNGAN BIZNAS SUMATERA UTARA
3	DUTA ROBIANSYAH	1903090011	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI KELUARGA PEMULUNG DI KELURAHAN TERJUN KOTA MEDAN
4	BAGUS HARIYANTO	1903090060	Drs. SHOHBIL ANSHOR SRG., M.Si	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN LINGKUNGAN DAN TEMAN SEBAYA DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA MUHAMMADIYAH
5	M. FADLAN	1903090024	Drs. SHOHBIL ANSHOR SRG., M.Si	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	REDUKSI KEMISKINAN MELALUI SOCIOPRENEURSHIP USAHA PENGOLAHAN SINGKONG DI DESA BINJAI, KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR, KABUPATEN TEBING SYAHBANDAR

Medan, 23 Dzulhijjah 1444 H
2023 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





MSU
Cerdas | Terpercaya

Web portal ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pergurvar. Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Qory Arfan
N P M : 1803090030
Program Studi : kesejahteraan sosial
Judul Skripsi : Proses perencanaan pembangunan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Simodong Kecamatan Sei-Suka Kabupaten Batubara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	12-06-2023	Bimbingan penulisan latar belakang masalah dan rumusan masalah	
2.	22-06-2023	Bimbingan Penulisan uraian teori-teori	
3.	29-06-2023	Bimbingan Penulisan metode penulisan dan teknik analisis data	
4.	13-07-2023	Seminar Proposal	
5.	01-08-2023	Bimbingan Penulisan draft Wawancara	
6.	22-08-2023	Bimbingan Penulisan hasil penulisan	
7.	07-09-2023	Bimbingan Penulisan hasil pembahasan penulisan	
8.	18-09-2023	Bimbingan Penulisan Kesimpulan penulisan	
9.	03-10-2023	Bimbingan akhir penulisan Skripsi	
10.	13-10-2023	ACC Sidang Maja hujau	

Medan,20.....

Dean,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

Dr. H. Mulyahudin, S.Pd, MSP
NIDN: 012008902

Pembimbing,

Dr. H. Mulyahudin, S.Pd, MSP
NIDN: 012008902





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 2199/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
2	QORY AREFAN*	1803090030	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si. S.O. CC	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIMODONG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA
3						
4						
5						
6						

Notulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:
Rektor
Wakil Rektor I
Prof. Dr. MUHAMMAD AREFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIWAN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Medan, 14 Diumadil Akhir 1444 H

27 Desember 2023 M

Sekretris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.Kom.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : QORY ARFAN
Tempat/Tgl Lahir : Simodong, 26 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Simodong Dusun 1 Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara
Anak Ke : 3 dari 3 Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : MUSLIM HARUN
Ibu : MARPUATUN
Alamat : Simodong Dusun 1 Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara

Pendidikan Formal

1. SDN 010229 SIMODONG
2. SMP IT AL IHYA TG.GADING
3. SMAN 1 SEI SUKA
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 20 Mei 2024

QORY ARFAN